

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan *annual reports* pada tahun 2011-2015. Alasan pemilihan objek penelitian pada sektor industri perbankan karena peneliti ingin mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik terhadap *risk management disclosure*, dan adapun analisis tambahannya yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat peneliti peroleh dari laporan keuangan perusahaan industri perbankan yang terdaftar di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank sebagai lembaga kepercayaan/lembaga intermediasi masyarakat dan merupakan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu perekonomian. Bank yang sehat merupakan kebutuhan dalam suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga pengelolaan bank dituntut agar senantiasa menjaga kesehatannya.

Semakin kompleksnya resiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* oleh perbankan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* ditujukan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan

yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank Indonesia menggagas peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum di peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

Pada dasarnya klasifikasi bank di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu Bank Sentral, Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, seperti kliring dan inkaso.

Terdapat 43 perusahaan perbankan yang ada di Indonesia dan telah *listing* di Bursa Efek Indonesia. Adapun *list* dari emiten tersebut, yaitu:

Tabel 1.1
Tabel Industri Perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia

No	Kode Saham	Emiten	No	Kode Saham	Emiten
1	AGRO	Bank Agroniaga Tbk	2	AGRS	Bank Agris Tbk
3	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk	4	BABP	Bank MNC International Tbk
5	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk	6	BBCA	Bank Central Asia Tbk
7	BBHI	Bank Harda International Tbk	8	BBKP	Bank Bukopin Tbk
9	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk	10	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	12	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
13	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk

Bersambung

No	Kode Saham	Emiten	No	Kode Saham	Emiten
15	BCIC	Bank J Trust Indonesia Tbk	16	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
17	BEKS	Bank Pundi Indonesia Tbk	18	BGTB	Bank Ganesha Tbk
19	BINA	Bank Ina Perdana Tbk	20	BJBR	Bank Jabar Banten Tbk
21	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	22	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk
23	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk	24	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
25	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk	26	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
27	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk	28	BNLI	Bank Permata Tbk
29	BSIM	Bank Sinar Mas Tbk	30	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk
31	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	32	BVIC	Bank Victoria International Tbk
33	DNAR	Bank Dinar Indonesia Tbk	34	INPC	Bank Artha Graha International Tbk
35	MAYA	Bank Mayapada International Tbk	36	MCOR	Bank Windu Kentjana International Tbk
37	MEGA	Bank Mega Tbk	38	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk
39	NISP	Bank OCBC NISP Tbk	40	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk
41	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	42	PNBS	Bank Panin Syariah Tbk
43	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			

Sumber: www.IDX.co.id (diolah)

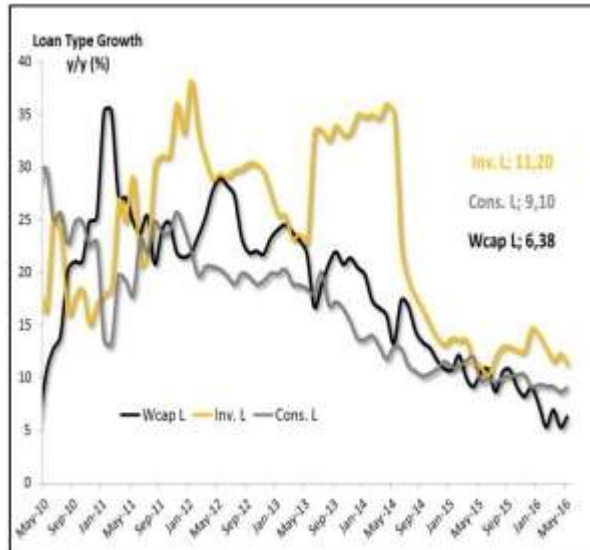
1.2 Latar Belakang Penelitian

Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) memiliki karakteristik khusus, dimana sebagian besar kewajibannya bersifat jangka pendek, sementara sebagian besar asetnya bersifat jangka panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi kewajiban yang harus diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun atau jangka satu siklus operasi normal perusahaan seperti, hutang usaha, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, utang pajak dan utang bunga. Sementara itu, aset berwujud (aset jangka panjang) yang digunakan untuk operasi normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal seperti, tanah untuk lokasi baru, gedung, mesin-mesin dan peralatan produksi, peralatan kantor, dan kendaraan.

Dalam menjalankan bisnisnya, perbankan sangat dipengaruhi oleh ekspansi pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Dapat dilihat dari penyaluran kredit industri perbankan pada periode Mei 2016 hanya tumbuh sebesar 8,34% (y/y), meningkat 39 bps dibandingkan pertumbuhan tahunan bulan April 2016. Sementara bila dilihat pertumbuhan bulanan (*month on month*) meningkat 143 bps. Kredit modal kerja yang porsinya mencapai 47% dari total kredit, pertumbuhannya lebih lambat dibanding jenis kredit lainnya yaitu sebesar 6,38% (y/y) di Mei 2016 (**dapat dilihat pada gambar 1.1**). Sementara kredit investasi dengan porsi 26% dari total kredit tumbuh sebesar 11,20%, dan kredit konsumsi dengan porsi 28% dari total penyaluran kredit tumbuh 9,10% (y/y). Hal ini dapat mengartikan bahwa pertumbuhan industri perbankan mengalami penurunan. Karena secara keseluruhan kredit investasi dan kredit konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan kredit perbankan.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Kredit

(sumber: OJK dalam Lembaga Penjamin Simpanan, 2016)



Jika dibandingkan dengan Negara tetangga (Thailand, Malaysia, dan Singapura), penetrasi transaksi non tunai di Indonesia masih jauh lebih rendah. Menurut *survey* Bank Indonesia (BI), transaksi ritel non tunai di Indonesia dibandingkan dengan konsumsi swasta pada 2011 baru mencapai 35%. Sementara di Thailand, penetrasi transaksi ritel non tunai sudah mencapai 41%, di Malaysia 45% dan di Singapura sudah mencapai 69%. Meskipun demikian, penetrasinya terus mengalami peningkatan. Pada 2012, persentase transaksi non tunai terhadap konsumsi swasta meningkat menjadi 39%. Kemudian pada 2013 mencapai 44%, 2014 mencapai 47%, dan 2015 mencapai 48%. Masih berdasarkan data BI, persentase transaksi ritel non tunai terhadap konsumsi swasta pada 2016 kembali mengalami peningkatan. Hingga Juli 2016, persentasenya telah mencapai 59%. (Infobanknews.com, 30 September 2016)

Krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997 bukan semata-mata disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga disebabkan karena belum terlaksananya *corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitulasi hanya akan menimbulkan dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga

tindakan penting lainnya, yaitu: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *corporate governance*, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank (Zarkasyi, 2008 dalam Fathimiyah, 2014).

Berikut merupakan kasus-kasus mengenai pembobolan perusahaan di perbankan yaitu Bank Citibank, Bank Mega, Bank BNI, Bank Century, dan Bank DKI (**dapat dilihat di tabel 1.3**) yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi bank tersebut khususnya pada manajemen likuiditasnya, yaitu kemampuan manajemen bank untuk memenuhi semua kewajiban. Selain itu, sistem keamanan bank masih terlalu lemah. Karena kasus seperti ini biasanya banyak melibatkan pihak internal yang mengetahui celah-celah keamanan bank. Oleh karena itu maka diperlukannya pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Tabel 1.3 Skandal Pembobolan di Perbankan

No	Nama Perusahaan	Kasus
1	Bank Century (2001)	Pembobolan dana nasabah dilakukan oleh Direktur Utama PT Century Mega Investama sekitar Rp 1 triliun - 1,5 triliun terkena masalah seputar produk yang dikabarkan sudah dijual sejak tahun 2001 (Tempo, November 2008)
2	Bank Negara Indonesia (Bank BNI) (2003)	Pembobolan dana Bank Negara Indonesia (Bank BNI) senilai Rp1,7 triliun dengan menggunakan surat kredit (L/C) fiktif yang dilakukan oleh Direktur PT Bhinekatama Pacific. (Tempo, November 2003)
3	Bank Citibank (2011)	Pembobolan dana nasabah senilai Rp 17 miliar oleh <i>Relationship</i>

Bersambung

Sambungan

		<i>Manager Citigold. (VIVAnews.com, april 2011)</i>
4	Bank Mega (2011)	Pembobolan dana deposito milik PT Elnusa Tbk yang diperkirakan mencapai Rp111 miliar oleh Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, Cikarang. (<i>VIVAnews.com, september 2011</i>)
5	Bank DKI (2016)	Direktur Utama pada Bank DKI memanfaatkan dana Bank DKI yang akan digunakan untuk membiayai sebagian dari proyek pembangunan di beberapa daerah yang totalnya senilai Rp779,6 miliar. (<i>Tempo, april 2016</i>)

Pada dasarnya perusahaan yang ada di Indonesia, terutama perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memberikan informasi yang lengkap mengenai kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*). Pernyataan tersebut didukung oleh Riski (2013) yang menyatakan bahwa laporan tahunan merupakan dokumen wajib yang harus disampaikan oleh perusahaan setiap tahunnya. *Disclosure* memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam sistem korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat dilihat dari tingkat keterbukaan atau transparansi (Lins dan Warnock, 2004). Informasi yang disajikan di dalam laporan tahunan perusahaan harus mudah dapat dipahami, dipercaya, relevan dan transparan, karena informasi yang memadai merupakan dasar dalam pengambilan keputusan yang dilakukan bagi investor, kreditor, dan pengguna informasi lainnya dalam melakukan investasi sehingga diperlukan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Sejak tahun 1990-an studi tentang pengungkapan (*disclosure*), baik pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) maupun pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) telah banyak dilakukan di Indonesia. Sebagian besar studi tersebut berkaitan dengan pengujian mengenai hubungan dan atau pengaruh karakteristik perusahaan terhadap perilaku pengungkapan perusahaan publik. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan risiko manajemen antara lain dilakukan Gessy A (2012) yang menguji faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko, Andini (2011) menguji bagaimana ketersediaan *risk management disclosure* pada laporan keuangan, serta Dyah (2015) menguji pengaruh signifikan variable ukuran dewan, kepemilikan manajerial, dan *leverage* terhadap *risk management disclosure*.

Di Indonesia, pengungkapan risiko oleh perbankan merupakan salah satu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang secara eksplisit diatur dalam PSAK 50 (revisi 2010), tujuan dari pengungkapan adalah menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrument keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas serta membantu penilaian jumlah waktu dan tingkat kepastian arus kas masa mendatang. Hasil penelitian dari Suhardjanto dan Dewi (2011) menunjukkan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko finansial. Selanjutnya, hasil pada penelitian Andini (2011) menunjukkan ukuran perusahaan dan waktu berpengaruh positif signifikan dan meningkat signifikan, sedangkan profitabilitas dan *leverage* berpengaruh tidak signifikan, maka *risk management disclosure* masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk kedepannya.

Industri perbankan di Indonesia yang semakin berkembang masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik. Tentu saja hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati dalam mengelola likuiditas keuangan dan risiko kreditnya. Sementara itu tidak transparannya praktik dan pengelolaan suatu bank mengakibatkan otoritas moneter sulit mendeteksi praktik

kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank (Sitompul, 2006 dalam Fathimiyah, 2014).

Dengan demikian, struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik (Hapsoro, 2007 dalam Fathimiyah, 2014) merupakan mekanisme pengawasan dari *corporate governance*, dimana mekanisme ini dapat mengontrol perbankan lebih optimal sehingga dapat menurunkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Selain itu, dapat mengurangi asimetri informasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*, terutama investor dan penabung.

Mekanisme pertama adalah kepemilikan manajemen. Kepemilikan manajemen adalah pihak manajerial dalam suatu perusahaan yang secara aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan (Wahidahwati, 2011). Manajemen sangat berperan dalam menjalankan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Dimana manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga berperan sebagai pemegang saham. Manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Persentase kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin besar pula tanggung jawab manajemen dalam mengambil suatu keputusan sehingga *risk management disclosure* pun menjadi semakin tinggi (Dampsey dan Laber, 1993 dalam Fathimiyah, 2014).

Kepemilikan institusi domestik sebagai mekanisme kedua pengawasan dari *corporate governance* memiliki peran penting, karena merupakan salah satu sumber dana perusahaan (Riski, 2013). Dengan adanya kepemilikan institusi domestik diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisiensi, sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* yang dilakukan oleh manajer. Adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya *financial distress* dan *financial risk* (Crutchley, 1999 dalam Saputro, 2014).

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 1 angka 6, menjelaskan bahwa kepemilikan asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Pertumbuhan yang pesat dari kepemilikan asing akan membuat perusahaan asing mengalami tekanan dari masyarakat sekitar (Ramadhan, 2010 dalam Rakchmawati, 2011). Partisipasi asing terhadap risiko perbankan, khususnya melalui jalur kepemilikan asing ke dalam pasar domestik. Partisipasi asing pada perbankan akibat globalisasi finansial dapat berupa meningkatnya kehadiran manajer-manajer asing dalam perbankan domestik, meningkatnya permintaan dari konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat aliran modal asing yang masuk (Sudarmono, 2011). Sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat risikonya pun semakin besar.

Mekanisme terakhir, kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar (Istiqomah, 2010) dalam Saputro (2014). Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) oleh perusahaan. Hal ini karena, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas. Kepemilikan publik dapat diartikan pula sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh masyarakat umum (bukan institusi signifikan). Kepemilikan publik memiliki arti penting dalam memonitor manajemen serta mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dalam perusahaan.

Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar rasio *leverage* tidak bertambah tinggi mengacu pada teori *packing order theory* menyatakan bahwa perusahaan menyukai *internal financing* dan apabila pendanaan dari luar (*external financing*) diperlukan. Maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila belum mencukupi, perusahaan akan menerbitkan saham. Pada intinya apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. Maka dapat disimpulkan rasio *leverage* yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan.

Sementara itu, ukuran perusahaan dapat diartikan besar kecilnya sumber daya yang dimilikinya. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Murdoko, 2007) dalam Saputro (2014). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi yang akan diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut.

Risk management disclosure merupakan hal penting yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan, karena *risk management disclosure* dapat dikatakan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah berhasil dikelola oleh sebuah perusahaan atau pengungkapan dimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa yang akan datang (Riski, 2013). Sedangkan menurut Amran *et al.*, (2009) dalam Gyovani (2013) memberikan pengertian bahwa manajemen risiko adalah proses dan metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risiko perusahaan (menangkap kesempatan) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi *risk management disclosure*, yaitu kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, serta tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel control.

1.3 Perumusan Masalah

Isu mengenai pengungkapan risiko merupakan isu yang menarik terkait dengan pengaruhnya dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *stakeholders*. Industri perbankan di Indonesia yang semakin berkembang masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik. Tentu saja hal ini

menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati dalam mengelola likuiditas dan risiko kreditnya. Sementara itu tidak transparannya praktik dan pengelolaan suatu bank yang dapat mengakibatkan otoritas moneter sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank (Sitompul, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali serta memperjelas faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada perumusan masalah penelitian maka akan timbul pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, *leverage*, ukuran perusahaan dan *risk management disclosure* di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *risk management disclosure* di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajemen terhadap *risk management disclosure* secara parsial di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusi domestik terhadap *risk management disclosure* secara parsial di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap *risk management disclosure* secara parsial di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?

6. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap *risk management disclosure* secara parsial di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *risk management disclosure* secara parsial di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
8. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *risk management disclosure* secara parsial di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi tingkat kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, *leverage*, ukuran perusahaan dan *risk management disclosure* di perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.
3. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan manajemen terhadap *risk management disclosure* secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan institusi domestik terhadap *risk management disclosure* secara parsial.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan institusi asing terhadap *risk management disclosure* secara parsial.
6. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap *risk management disclosure* secara parsial.
7. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *risk management disclosure* secara parsial.

8. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *risk management disclosure* secara parsial.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan risiko manajemen.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literature akuntansi manajemen mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan pengungkapan manajemen risiko.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi Perusahaan di Indonesia
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pengungkapan risiko bagi manajer perusahaan untuk membantu memperbaiki praktek pengungkapan risiko di perusahaan.
- b. Bagi Investor di Indonesia
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan yang memiliki pelaporan risiko.
- c. Bagi Bursa Efek Indonesia
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada perusahaan khususnya industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau seluruh

perbankan di Indonesia mengenai pentingnya penerapan praktik *risk management disclosure*.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjeasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan secara ringkas, dan padat mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir

untuk menggambarkan masalah penelitian serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori perusahaan, *agency theory*, teori *signalling*, *stakeholder*, *corporate governance*, pengungkapan manajemen risiko, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan independen, definisi variabel operasional, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik) terhadap variabel dependen (*risk management disclosure*). Adapun analisis tambahannya yaitu *leverage*, dan ukuran perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengkuan risiko manajemen perusahaan dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.